

## DAFTAR RUJUKAN

### Buku:

- Abdullah K. (2018). *Berbagai Metodologi dalam Penelitian Pendidikan dan Manajemen*. Gowa:Gunadrama Ilmu.
- Arba, H. (2019). *Hukum Agraria Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Aryantie, I. R., O. Moechthar dan A. M. Widjaja. (2022). *Pemahaman Seputar Sertifikat Hak Atas Tanah Dan Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun*. Surabaya: CV. Jakad Media Publishing.
- Efendi, J. dan Johnny Ibrahim. (2018). *Metode Penelitian Hukum*. Depok: Prenamedia Group.
- Hartanto, J A. (2022). *Panduan Lengkap Hukum Praktis Kepemilikan Tanah*. Yogyakarta: Laksbang Justitia.
- Harsono. (2013). *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaanya*. Universitas Tri Sakti.
- Harun, B. (2013). *Solusi Sengketa Tanah dan Bangunan*. Yogyakarta: Pustaka Yudistia.
- Hikmawati, F. (2020). *Metodologi Penelitian*. Depok: PT Raja Grafindo.
- Idham, H. (2019). *Postulat dan Konstruksi Paradigma Politik Hukum Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Guna Mewujudkan Negara Berkesejahteraan*. Bandung: P.T. Alumni.
- Ishaq, H. (2017). *Metode penelitian hukum dan penulisan skripsi. Tesis, Serta Disertasi*. Bandung: Alfabeta.
- Ismaya, S. (2018). *Hukum Administrasi Pertanahan*. Yogyakarta: Suluh Media.
- Mahardika, V. R., Prakoso Bhim., dan Hariyani I. (2022). *Kedudukan Subyek Hukum Ditinjau Dari Hak Keperdataan (Refleksi: Terjadinya Tumpang Tindih Lahan Hak Guna Usaha)*. Jember: UM Jember Press.
- Manan, B. dan Magnar. (2017). *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara*. Bandung: PT. Alumni.
- ND, Fajar M., dan Yulianto Achmad. (2010). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Hukum Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ramadhani, R. (2022). *Hukum Pertanahan Indonesia dan Perkembangannya*.

Medan: Umsupress.

Sahir, Syafrida Hafni. (2021). *Metodologi Penelitian*. Jogjakarta: KBM Indonesia.

Santoso, Urip. (2010). *Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah*. Jakarta: Kencana.

Sihombing, Romi. (2022). *Cacat Administrasi Pembatalan Sertifikat Tanah Oleh BPN Tanpa Putusan Pengadilan*. Jakarta: Kencana.

Sutedi, Adrian. (2007). *Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya*. Jakarta: Sinar Grafika.

Sutedi, Andrian. (2011). *Sertifikat Hak Atas Tanah*. Jakarta: Sinar Grafika.

Susila, IGN G. (2014). *Kejahatan Sertifikat Tanah Ganda (Dalam Perspektif Modus, Akibat Hukum dan Solusi Kritis Penyelesaian Masalah)*. Malang: UB Press.

Syah, Mudakir Iskandar. (2019). *Panduan Mengurus Sertifikat Dan Penyelesaian Sengketa Tanah*. Jakarta: Bhuana Ilmu Populer.

Tehupeiory, Aartje. (2012). *Pentingnya Pendaftaran Tanah di Indonesia*. Jakarta: Raih Asa Sukses.

Wahdini, Muhammad. (2022). *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Yogyakarta: K-Media.

Waskito dan Ir. Hadi Arnowo. (2019). *Penyelenggaraan Pendaftaran Tanah di Indonesia*. Jakarta: Kencana.

#### **Artikel Dalam Jurnal:**

Abon, Maria Avelina. Komang Febrinayanti Dantes & Ni Ketut Sari Adnyani. (2022). *Akibat Hukum Peralihan Hak Atas Tanah Waris Berdasarkan Pasal 20 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria*. *Journal Komunikasi Yustisia* Volume 5, Nomor 3.

Ardiansyah, Galang Mahendra. Dewa Gede Sudika Mangku dan Ni Putu Rai Yuliartini. (2022). *Penyelesaian Sengketa Kepemilikan Sertifikat Ganda Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Di Kabupaten Banyuwangi (Studi Kasus Sengketa Tanah Di Kelurahan Klatak Kabupaten Banyuwangi)*. *Jurnal Komunitas Yustisia* Volume 5, Nomor 2.

- Avivah, Nur Lisnadia, dkk. (2022). *Pentingnya Pendaftaran Tanah Untuk Pertama Kali Dalam Rangka Perlindungan Hukum Kepemilikan Sertifikat Tanah*. *Tunas Agraria*, 5 (3). Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional. Doi <https://doi.org/10.31292/jta.v5i3.186>.
- Chumaidi, Imron. (2022). *Panduan Kepemilikan Tanah Problematika Sertifikat Tanah Secara Sporadik*. Jawa Tengah: Lawwana.
- Dantes, Ni Komang Febrinayanti dan I Gusti Ayu Apsari Hadi. (2021). *Dasar Hukum Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB) Di Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Buleleng*. *Jurnal Komunikasi Hukum* Volume 7, Nomor 1. Doi <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jkh/article/view/32322/17593>.
- Febriana, Novia Tika dan Murry Darmoko A. (2022). *Langkah Hukum Terhadap Sengketa Tumpang Tindih (Overlapping) Atas Hak Sertifikat Tanah (Studi Kasus Putusan Nomor 181/B/2020/PT.TUN.SBY)*. *Jurnal Judiciary* Volume 11, Nomor 1.
- Gayatri, Ni Made Silvia, dkk. (2021). *Pembatalan Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Akibat Cacat Administrasi*. *Jurnal Analogi Hukum* Volume 3, Nomor 1.
- Halilah, Siti dan Mhd. Fakhrurrahman Arif. (2021). *Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli*. *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara*, Volume 4. STAI An-Nadwah Kuala Tungkal. Doi <https://ejournal.an-nadwah.ac.id/index.php/Siyasah/article/download/334/275>.
- Hermawan, I Komang Dodyk Ari dan I Gede Surata. (2020). *Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Buleleng*. *Kertha Widya: Jurnal Hukum* Volume 8, Nomor 2.
- Irfan, Muhammad dan Nia Kurniati. (2018). *Kepastian Hukum Hak Atas Tanah Dan Eksistensi Lembaga Rechtsverwerking Dalam Perspektif Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah*. *Jurnal Hukum Kenotariatan dan Ke-PPAT-an* Volume 1, Nomor 2.

- Karim, Marsella Patrya, dkk. (2023). *Akibat Hukum Dari Diterbitkannya Sertifikat Tanah Dengan Kepemilikan Ganda*. *Journal Of Comprehensive Science* Volume 2 Nomor 6.
- Kumara, I Made Citra Gada, dkk. (2021). *Kepastian Hukum Pemegang Hak Atas Tanah Dalam Sistem Hukum Pertanahan Di Indonesia*. *Jurnal Preferensi Hukum* Volume 2, Nomor 3.
- Lestario, dkk. (2022). *Sistem Pendaftaran Tanah yang memberikan Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Sertifikat Hak atas Tanah di Indonesia*. *Notary Law Journal* Volume 1, Issue 1. Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Doi <https://doi.org/10.32801/nolaj.v.1i1.1>.
- Mujiburohman, D. A. (2018). *Potensi Permasalahan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)*. *Bhumi: Jurnal Agraria dan Pertanahan* Volume 4, Nomor 1.
- Nae, Fandri Entiman. (2013). *Kepastian Hukum Terhadap Hak Milik Atas Tanah Yang Sudah Bersertifikat*. *Lex Privatum* Volume 1, Nomor 5.
- Pahlevi, Farida Sekti. (2022). *Pemberantasan Korupsi Di Indonesia: Perspektif Legal System Lawrence M. Friedman*. *Jurnal El-Dusturie* Volume 1, Nomor 1.
- Permadi, A.A Ngr Wisnu, dkk. (2017). *Kepastian Hukum Pendaftaran Hak Atas Tanah*. *Kertha Negara: Journal Ilmu Hukum*, Volume 5, Nomor 2.
- Ricky dan Sryani Br. Ginting. (2020). *Akibat Hukum Sertifikat Ganda Dalam Hukum Pertanahan Indonesia*. *Jurnal Law Pro Justitia* Volume V, Nomor 2.
- Saraswati, Annisa Meinar dan Edith Ratna M. S. (2022). *Pembatalan Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Karena Overlapping Di Kantor Pertanahan Kota Semarang*. *Notarius* Volume 15, Nomor 1.
- Sari, Syarifah Lia Malini. (2017). *Kepastian Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Timbulnya Tumpang Tindih Sertifikat Hak Milik (SHM) Atas Tanah (Studi Kasus Di Kantor Pertanahan/Agraria Dan Tata Ruang Kota Pontianak)*. *Jurnal Akta* Volume 4, Nomor 1.
- Sorongan, Ricardo J. (2015). *Dampak Yuridis Penerbitan Sertifikat Ganda Oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN)*. *Lev et Sociates*, Volume III, Nomor 3.

Susanto, I Made Herman. (2020). *Laporan Aksi Perubahan Percepatan Pembangunan Kelurahan Lengkap Di Kota Singaraja Melalui Instrumen Sistem Campuran Tahun 2020*. Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng.

Syaiffudin, Sendy Salsabila dan Yulia Qamariyanti. (2022). *Kepastian Hukum Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Atas Terbitnya Surat Keterangan Tanah Pada Objek Tanah Yang Sama*. NoLaj: Notary Law Journal Volume 1 Issue 1.

Wardani, Baiq Rika Septina, dkk. (2023). *Akibat Hukum Atas Terbitnya Sertifikat Tumpang Tindih (Overlapping) Dalam Program Pendaftaran Tanah Sistematis lengkap (Studi Kasus Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat)*. Jurnal Risalah Kenotariatan Volume 4, Nomor 1. Fakultas Hukum Universitas Mataram.

Widyani, I Dewa Ayu. (2015). *Kepastian Hukum Sistem Publikasi Dalam Pendaftaran Tanah Di Indonesia Menurut UU RI Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok Agraria*. Jurnal Universitas Kristen Indonesia. Doi <https://doi.org/10.33541/tora.v1i3.1147>.

#### **Artikel Dalam Internet:**

Sinaga, Adolf Robert. (2020). *Ciri-ciri Pendaftaran Tanah dengan Sistem Publikasi Negatif*. Terdapat di <https://www.hukumonline.com/klinik/a/ciri-ciri-pendaftaran-tanah-dengan-sistem-publikasi-negatif-1t5fe09df36c28c/>. (diakses pada 12 Oktober 2023).

\_\_\_\_\_. (2022). *BPN Terbitkan Sertifikat Ganda Di Tinga-Tinga?, Made Tantra Ajukan Keberatan*. Terdapat di <https://www.suaradewata.com/read/202205210005/bpn-terbitkan-sertifikat-ganda-di-tinga-tinga-made-tantra-ajukan-keberatan.html>. (diakses pada 22 Desember 2023).

#### **Skripsi/Tesis:**

Maharani, Ni Luh Putu Egi Santika. (2022). *Kepastian Hukum Terhadap Sertifikat Tanah Yang Terbit Ganda Di Desa Julah, Kecamatan Tejakula,*

*Buleleng*. Skripsi Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pendidikan Ganesha.

Paramitha, Putu Cyntia Alika. (2023). *Penyelesaian Sengketa Secara Non Litigasi Dalam Proses Sertifikasi Tanah Akibat Dari Sertifikat Ganda Di Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Buleleng*. Skripsi Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pendidikan Ganesha.

Nurhidayatullah, Muhammad Rizal. (2019). *Pengelesaian Sengketa Tanah Terindikasi Overlapping Melalui Alternative Dispute Resolution Oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Brebes*. Tesis, Universitas Muhammadiyah Purwokerto.

Farizky, Havidz. (2018). *Faktor-Faktor Terjadinya Tumpang Tindih Sertipikat Hak Atas Tanah Dalam Pendaftaran Tanah Di Kabupaten Sukoharjo*. Skripsi. Program Studi (S1) Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia.

#### **Peraturan Perundang-undangan:**

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, (Lembaran Negara No. 75, 1959).

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, (Lembaran Negara No. 104, 1960, Tambahan Lembaran Negara No. 2043).

Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, (Lembaran Negara No. 59, 1997).

Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2020 tentang Badan Pertanahan Nasional, (Lembaran Negara No. 84, 2020).

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan, (Berita Negara Nomor 569, 2016).

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan, (Berita Negara Nomor 1369, 2020).

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, (Berita Negara Nomor 501, 2018).

